

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pelaksanaan rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan oleh DPD Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah :
 - a. Bahwa masing-masing DPD/DPC Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman telah ikut ambil bagian sebagai peserta dan memproses rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan menjalankan perintah atasan secara hirarkis mulai dari DPP dan DPW baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya hasil dari penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati disampaikan ke DPW Propinsi.
 - b. Bahwa masing-masing DPD/DPC Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan rekrutmen bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 walaupun belum mempunyai pedoman atau petunjuk secara jelas yang diberikan oleh DPW maupun DPP.
 - c. Bahwa hasil penjaringan terhadap bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015 yang telah dilaksanakan oleh DPD/DPC Partai Politik Kabupaten yang disampaikan ke DPW,

ternyata tidak sama hasilnya dengan nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat persetujuan dari DPP. Hal ini terjadi pada hasil rekrutmen DPC Partai Kebangkitan Bangsa, DPC Partai Hanura dan Partai Nasdem Kabupaten Padang Pariaman.

2. Berkaitan dengan kewenangan yang telah dilakukan oleh DPD Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman terhadap rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman terlihat hanya sebatas melaksanakan rekrutmen bakal calon melalui proses penjangkaran dan menyampaikan laporan/tembusan hasil penjangkaran ke DPW Propinsi serta dapat memberikan fasilitasi terhadap bakal Calon untuk bertemu dengan Pengurus DPW sesuai permintaan bakal calon.
- b. Bakal calon yang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari DPP adalah sepenuhnya kewenangan dari DPP atas usul DPW dan tidak terlihat ada pengaruh dari hasil laporan penjangkaran oleh DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Bakal Calon yang mendapat persetujuan dari DPP dapat diasumsikan sangat dipengaruhi oleh hubungan komunikasi dan lobi-lobi Bakal Calon dengan DPW dan DPP.
- d. Untuk tingkat DPP, dari 4 (empat) DPD/DPC Partai Politik yang diteliti hanya DPC PKB dan DPC Hanura Kabupaten Padang

Pariaman yang dapat ikut mendampingi bakal calon ke DPP bersama DPW Propinsi.

B. Saran-Saran

1. Untuk proses rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, peneliti seyogianya meyarankan sebagai berikut :

a. Terkait dalam proses pelaksanaan rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diberikan pedoman/petunjuk secara jelas bagi masing-masing DPD/DPC oleh DPW maupun DPP yang didalam AD dan ART Partai Politik.

b. Laporan hasil rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan oleh DPD Partai Politik Kabupaten perlu menjadi bahan kajian, masukan dan pertimbangan oleh DPW maupun DPP dalam memberikan persetujuan/rekomendasi terhadap Bakal Calon.

2. Untuk kewenangan DPD Partai Politik Kabupaten menyarankan sebagai berikut :

a. Perlu pengkajian ulang secara mendalam terhadap regulasi tentang kewenangan dari DPD/DPC Partai Politik Daerah dalam melakukan rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini yang masih bersifat sentralistik yang tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang bersifat desentralisasi. Untuk perlu kiranya pengaturan secara jelas tentang kewenangan DPD/DPC Partai Politik

tingkat Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yang dijabarkan dalam AD dan ART Partai Politik.

- b. Dalam memberikan persetujuan terhadap Bakal Calon, sebaiknya DPW perlu melakukan koordinasi dan meminta masukan dari DPD/DPC Partai Politik Kabupaten tentang rekam jejak Bakal Calon, bukan hanya dari hasil koordinasi dan komunikasi dengan para Bakal Calon dan DPP. Untuk pengaturannya kiranya dapat dimuat dalam AD dan ART Partai Politik.

